



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AULIA RAHMAN**
2. Jabatan : **PEMERIKSA AHLI PERTAMA/ PERTAMA**
3. NHK : **167896**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.426.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/195 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , WARISAN Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **199.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
4. MOTOR, YAMAHA RX KING SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
6. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 WD CVT XT A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **8.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	114.186.238
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.747.686.238
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.747.686.238

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.